



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kementerian Negara	5
2.2 Keuangan Negara	6
2.3 APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)	6
2.4 Tinjauan Umum PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	7
2.4.1 Pengertian PNBPN	7
2.4.2 Objek dan Subjek PNBPN	8
2.4.3 Pengelompokan Jenis PNBPN	8
2.5 Penatausahaan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	9
2.5.1 Penetapan Tarif atas Jenis PNBPN	9
2.5.2 Penagihan PNBPN	9
2.5.3 Pembayaran atau Penyetoran PNBPN	10
2.6 PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Sektor Kehutanan	10
2.7 Potential Loss	12
2.8 Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	13
3 METODE	14
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	14
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	14
4 KEADAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	14
4.1 Sejarah	15
4.2 Kegiatan	17
4.3 Struktur Organisasi	18
4.4 Fungsi dan Tujuan	19
5 HASIL DAN PEMBAHASAN	20
5.1 Pelaksanaan PNBPN Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan	20
5.1.1 Penataan Batas Kawasan Hutan	20
5.1.2 Pengenaan PNBPN atas Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	21
5.1.3 Pengukuran Tarif	23
5.1.4 Penagihan	23

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

5.1.5	Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran	24
5.1.6	Pelaporan atau Pertanggungjawaban	25
5.1.7	Monitoring dan Evaluasi	26
5.1.8	Mekanisme Pelaksanaan Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas	26
5.2	Potential Loss yang terjadi dalam Pelaksanaan PNBP Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	27
5.2.1	Perubahan Sistem Layanan Penerimaan Negara	27
5.2.2	Mekanisme Pelaksanaan Layanan MPN G2	29
5.2.3	Latar Belakang Terjadinya Perubahan Sistem	30
5.2.4	Perbandingan MPN G1 dan MPN G2	31
5.2.5	Dampak Berlakunya Sistem Layanan MPN G2 pada Pengelolaan PNBP Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas	31
5.2.6	Perhitungan Potential Loss	33
5.2.7	Solusi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	35
	SIMPULAN DAN SARAN	38
6.1	Simpulan	38
6.2	Saran	38
	DAFTAR PUSTAKA	39
	LAMPIRAN	40



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

DAFTAR TABEL

1	Jenis-Jenis PNBK Kehutanan	11
2	Perbedaan MPN G1 dan MPN G2	31
3	Perhitungan Potential Loss	33

DAFTAR GAMBAR

1	Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2018	2
2	Realisasi Pendapatan Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas	3
3	Struktur Organisasi Ditjen PKTL	19
4	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	21
5	Kawasan Berimpit	22
6	Mekanisme Pelaksanaan PNBK	26



7	Periode Permasalahan Pembayaran MPN G1	27
8	Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran PNPB Melalui MPN G2	29
9	Tampilan Pembuatan Kode Billing SIMPONI	32
10	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	34
11	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	35
12	Alur Penerbitan Peraturan Pemerintah	37

DAFTAR LAMPIRAN

1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	41
2	Struktur Organisasi Biro Keuangan	41
3	Surat Tagihan Nomor S.544/BPKH.IV/PKH/PLA.2/10/2019	42
4	Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5908/PB/2016	43
5	Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10167/PB/2016	44
6	Surat Edaran Ditjen Nomor S.441/SETDIT/KU/KUM.1/4/2016	45
7	Surat Edaran Ditjen Nomor S.480/SETDIT/KU/KEU-1/9/2019	46



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies